

Radical and Moderate Currents of the Indonesian National Movement

Cindy Via Situngkir¹, Dania Amanda Br Silitonga², Nasya Adinda Putri Lubis³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: situngkircindy@gmail.com; silitongadaniaamanda@gmail.com; nasyaputri01192003@gmail.com

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang terjajah akan selalu muncul suatu usaha untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah sehingga memiliki kehidupan yang merdeka. Tujuan penulisan artikel ini akan mengkaji tentang aliran radikal dan moderat pada masa Pergerakan Nasional. Metode Penelitian artikel ini adalah metode Deskripsi Kualitatif dengan kajian yang bersumber dari jurnal, buku fisik dan non fisik. Organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi 3 periode yaitu masa pembentukan, masa radikal dan juga masa moderat.

Keyword: Pergerakan Nasional; Aliran Radikal; Aliran Moderat

ABSTRACT

In the lives of people, especially colonized people, there will always be an attempt to free themselves from the shackles of colonialism so that they can have an independent life. The aim of writing this article is to examine radical and moderate currents during the National Movement. The research method for this article is a qualitative description method with studies sourced from journals, physical and non-physical books. National movement organizations in Indonesia are divided into 3 periods, namely the formation period, the radical period and also the moderate period.

Keyword: National Movement; Radical Flow; Moderate Flow

Corresponding Author:

Cindy Via Situngkir,
Universitas Negeri Medan,
Jl. Willian Iskandar Ps. V Kenangan Baru, Kec.Percut Sei Tuan, Sumatera
Utara 20221, Indonesia
Email: situngkircindy@gmail.com



1. INTRODUCTION

Kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang terjajah akan selalu muncul suatu usaha untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah sehingga memiliki kehidupan yang merdeka. Di Indonesia bentuk atau usaha untuk melepaskan diri dari penjajah ini terdapat dua fase yang pertama adalah masa sebelum abad ke-20 atau yang biasa disebut dengan perlawanan secara nonkooperatif, pada masa ini perlawanan rakyat Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari belenggu penjajah masih bersifat kedaerahan dan alat untuk melawannya merupakan senjata seperti bambu runcing, sedangkan fase yang kedua yaitu dimulai pada tahun 1908 atau tepatnya setelah organisasi pertama resmi didirikan yaitu organisasi Budi Utomo.

Dalam mengartikan pergerakan nasional, secara umum dapat diartikan melalui pendekatan "multidimensional", yang berarti meliputi segala bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi dan juga politik.¹ Namun diantara bidangbidang yang telah disebutkan tersebut yang paling menonjol atau berpengaruh adalah pergerakan nasional yang ditinjau dalam bidang politik. Karena pola penjajahan sudah dipastikan menggunakan aspek politik dalam segala bidang. Konsep tinjauan multidimensional ini dapat digunakan untuk melihat corak perjuangan setiap organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia yang terbagi menjadi 3 periode yaitu masa pembentukan, masa radikal dan juga masa moderat. Namun tidak semua organisasi ini menjalani organisasinya secara multidimensional, contohnya saja seperti Indische Partij

Selain organisasi-organisasi besar yang bersifat nasional, perjuangan rakyat Indonesia dalam masa pergerakan nasional ini dihiasi juga oleh organisasi pergerakan yang bersifat daerah namun memiliki tujuan nasional, seperti Jong Java, Jong Minahasa, Jong Bataks Bond, Pasundan, Jong Ambon, Jong Clebes, Jong Sumatranen Bond, Timorsch Verbond dan kaum betawi dan yang lainnya. Selain organisasi daerah yang sudah disebutkan diatas, tentu saja masih ada organisasi-organisasi daerah pada masa pergerakan nasional yang lain. Namun penggambaran dari organisasi diatas merupakan organisasi-organisasi yang menjadi cikal

bakal lahirnya sumpah pemuda nantinya. Seiring berjalannya waktu dan semakin menjamurnya organisasi-organisasi pergerakan di berbagai daerah pihak kolonial Belanda pun mengambil sebuah kebijakan demi menjaga status quo nya.

Ketika mulai banyak terjadi pergerakan radikal serta pemberontakan, salah satu jalan yang diambil oleh Pemerintah Kolonial untuk tetap mempertahankan status quonya yaitu dengan membentuk sebuah Dinas Intelijen Politik. Pembentukan Dinas Intelijen Politik dikarenakan organisasi yang terus tumbuh dan berkembang serta ada beberapa organisasi yang bersifat radikal ini sangat mempengaruhi ruang gerak setiap organisasi karena DIP sangat mengawasi segala gerak gerik yang dianggap mencurigakan dan dapat menyebabkan terancamnya status quo pemerintah kolonial Belanda. Selain dibentuknya DIP tentu saja ada hal lain yang menyebabkan terjadinya krisis pergerakan yaitu pada masa krisis malaise pada tahun 1930 yang terjadi dan juga pemberontakan komunis kepada pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926/1927.

Perjuangan dalam babak baru yang terjadi di Indonesia atau yang biasa disebut dengan zaman pergerakan nasional sangat berpengaruh pada proses perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Organisasi yang sangat berpengaruh tersebut seperti Budi Utomo, PNI, PKI, Parindra, GAPI serta organisasi seperti Jamiatul Khair, Al-Isyad, Taman Siswa, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lainnya.

Masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada akhirnya berakhir pada tahun 1942 yaitu pada saat pemerintahan Jepang mengambil alih Indonesia atau Hindia Belanda ini dari Belanda dengan melakukan ekspansi militer sehingga kolonial Belanda pun tidak sanggup menghadapinya dan akhirnya menyerah. Maka pada tahun 1942 inipun berakhir masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dan digantikan oleh masa pemerintahan kolonial Jepang. Tujuan penulisan artikel ini akan mengkaji tentang aliran radikal dan moderat pada masa Pergerakan Nasional.

2. RESEARCH METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Didalam kajian ini sumber yang digunakan meliputi Buku, Jurnal, Artikel baik dari Internet maupun sumber cetak. Sumber-sumber yang digunakan dari peneliti terdahulu menjadibahan acuan bagi penulis untuk membahas secara detail tentang menganalisis aliran radikal dan moderat masa pergerakan nasional Indonesia

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. Aliran Radikal Masa Pergerakan Nasional

Secara etimologi, istilah radikal berasal dari bahasa latin radix atau radici yang artinya adalah akar, sumber, atau asal mula. Ketika dimaknai secara luas maka radikal mengarah pada pemaknaan hal-hal yang mendasar, prinsip-prinsip, pokok-pokok persoalan, atau hal-hal yang esensial. Dari masa ke masa istilah ini dipakai sebagai kata sifat yang dihubungkan dengan makna asalnya yaitu akar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis. Sartono (1985: 38) mengemukakan bahwa radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak hak istimewa dan berkuasa. Sedangkan dalam ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Adapun Beberapa contoh Organisasi Radikalisme adalah:

1) Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pada awal abad ke-20, Uni Soviet merupakan negara berpaham komunisme pertama di dunia, dengan Vladimir Lenin sebagai pemimpin dari revolusi komunisme yang dilakukan. Dalam rangka menyebarkan paham komunisme keseluruh dunia, Lenin membentuk Communist International (Comintern) dengan tujuan untuk membangkitkan revolusi komunis di seluruh dunia agar mengakibatkan kehancuran kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme. Sebagai salah satu utusan dari Comintern, Tan Malaka memiliki tugas sebagai penyebar paham komunisme di Hindia-Belanda. Namun walaupun demikian, beliau bukanlah pelopor dari munculnya paham komunisme di Hindia Belanda tersebut. Penyebar komunisme pertama di Hindia Belanda adalah seseorang yang bernama Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet.

Pada tahun 1914, Sneevliet dan koleganya membentuk serikat. Buruh bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging. (ISDV) pada Pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda, dalam rangka menjamin kesejahteraan kerja para buruh yang bekerja dalam Pelabuhan-pelabuhan tersebut. ISDV memiliki 85. Anggota yang berasal dari partai-partai Belanda. Meskipun begitu, para anggota ISDV memanfaatkan serikat ini untuk memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang pribumi, terutama buruh dalam mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial. D tahun-tahun. Berikutnya setelah pembentukan serikat ini, ISDV terus melakukan penyebaran pandangan Marxisme kepada masyarakat pribumi, baik kaum buruh, intelek,

agamawan, hingga nasionalis. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan surat kabar yang menerbitkan. Berita-berita seputar anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme. Pengaruh dari ISDV dan Sneevliet terlihat pada sejumlah kaum yang kemudian beralih pandangan kepada ide-ide marxisme. Hal ini yang terjadi pada organisasi keagamaan seperti Sarekat Islam (SI) yang mengalami kepecahan pandangan mengenai ide-ide yang dibawa oleh Sneevliet tersebut. Akibatnya SI pecah menjadi dua, yakni SI Merah yang dipengaruhi Sneevliet dan SI Putih yang menolak pengaruh Sneevliet.

Melihat pengaruhnya terhadap masyarakat pribumi dengan ide-ide anti-kolonial yang dapat berujung pada pengupayaan pemberontakan, pemerintah Belanda kemudian mengusir paksa para kader ISDV dengan memulangkan anggota-anggotanya kembali ke Belanda. Sneevliet sendiri dipulangkan ke Belanda pada tahun 1918, meninggalkan ISDV kepada kurang lebih 400 anggota yang tersisa. Pada tahun 1919, kurang lebih 400 anggota ISDV tersebut didominasi oleh orang-orang pribumi, dengan orang Belanda yang hanya beranggota 25 orang saja.

Setelah kepergian kader-kader Belanda anggota ISDV beserta Sneevliet, pengaruh dari ide-ide marxis yang mereka tanamkan tetap tinggal pada anggota-anggotanya serta simpatisan serikat buruh tersebut. Sosok kepemimpinan Sneevliet kemudian diambil alih oleh kader-kader utamanya yakni, Semaun dan Darsono. Mereka kemudian meneruskan berbagai upaya penyebaran paham marxisme, dan mengaktualisasikannya dengan pembentukan organisasi politik yang bernama Perserikatan Komunis di Hindia (PKH) pada tahun 1920 (Sinaga, 1960), Semaun kemudian menjadi ketua, dan Darsono menjadi wakil ketuanya, dengan orang-orang Belanda bekas kader ISDV menjadi sisa perangkat organisasi lainnya. PKH kemudian menjadi organisasi berpaham komunis pertama di Asia, yang kemudian mendapat rekognisi internasional berkat bantuan dari Sneevliet. Pada tahun 1924, PKH kemudian mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang secara bersamaan meresmikan posisinya sebagai organisasi politik yang bertujuan dalam perjuangan pergerakan kernerdekaan Indonesia. Perubahan nama tersebut, membuat PKI memiliki hubungan yang semakin kuat dengan Comintern, yang mana membuat partai ini semakin tidak sejalan dengan nilai dan cita-cita dari Pan-Islamisme. Pihak St membalas hal tersebut melalui penerbitan surat kabar, beserta pembahasan dalam kongresnya. Untuk mengakhiri infiltrasi ideologi yang dilakukan oleh PKI dalam St maka dalam Kongres SI ke-6 yang dilakukan di Surabaya, Agus Salim dan Abdul Muis mendesak agar disiplin partai harus ditegakkan dalam melarang keanggotaan rangkap jabatan dalam keorganisasian lain. Hal ini kemudian membuat kecewa St merah vang. Telah tergabung dalam PKI. Sebagai balasan, PKI mengadakan kongres di Bandung, dimana mereka memutuskan bahwa di mana ada St-Putih di situ pula didirikan SI- Merah. Pada bulan April 1924 SI Merah berganti nama menjadi Sarekat Rakyat, dan resmi menjadi sub organisasi dari PKI, yang kemudian melebur dengan PKI pada bulan Desember 1924.

Pada tahun 1925, PKI beserta afiliasinya mendorong sebuah pergerakan pemogokan oleh para buruh dalam sektor penting seperti kereta dan trem, yang mana hal ini dimaksudkan untuk memulai penolakan besar besaran pada pemerintah Belanda yang diharapkan berujung pada revolusi (Sinaga, 1960). Sebelumnya, pemerintah Belanda telah melakukan upaya untuk menghentikan Gerakan dari PKI ini, hal tersebut dilakukan. Dengan pengasingan yang dilakukan kepada pemimpin-pemimpin PKL. Tan Malaka tahun 1922 dibuang dan diusir dari Indonesia. Sedangkan Semaun diasingkan ke Eropa pada tahun 1923, dengan anggota-anggota lainnya yang diasingkan ke Boven Digul, Irian Barat. Sedangkan pada Januari 1926, para pentolan PKI yang tersisa seperti Musso, Boedisoetjito, dan Soegono rencananya akan ditangkap oleh Gubernur Jendral van Limburg Stirum tetapi mereka telah pergi ke Singapura untuk menghindari penangkapan tersebut. Akibat kosongnya para pemimpin PKI yang sedang melarikan diri di luar negeri, para anggota PKI dan simpatisannya menjadi kacau. Banyak yang kemudian melakukan aksi- aksi pergerakan yang tidak sesuai dengan pandangan komunisme secara teoritis. Hal ini berpuncak pada wacana pemberontakan dimana pihak PKI mendeklarasikan sebuah Republik pada tahun 1925. Wacana pemberontakan tersebut ditentang oleh Tan Malaka, dengan Alimin mencoba mendiskusikannya dengan beliau di Manila perihal wacana tersebut.

Tan Malaka menjawabnya dengan keputusan prambanan yang menjelaskan pertentangannya mengenal wacana tersebut dalam lima poin, yaitu (a) Situasi revolusioner belum ada. (b) PKI belum cukup berdisiplin, (c) Seluruh rakyat belum berada di bawah. PKI. (d) Tuntutan/sumbangan konkret belum dipikirkan. (e) Imperialisme internasional bersekutu melawan komunisme. Hal ini kemudian memicu terpecah pelahnya pandangan Tan Malaka dengan Alimin, terlebih lagi para simpatisan PKI yang kebingungan untuk mengikuti pandangan yang mana mengingat ketidakhadiran pemimpin-pemimpin ini di tanah air. Bagai ayam kehilangan induknya, para anggota PKI tanpa para pemimpinnya menjadi sangat militan. Hal ini berujung pada pelaksanaan pemberontakan militan yang dilakukan malam hari tanggal 12 November 1926. Di Jawa Barat (Banten, Priangan) dan menyusul 1 Januari 1927 di Sumatra Barat. Pemberontakan di Batavia dapat ditumpas dalam waktu satu hari. Di Banten dan Priangan penumpasan selesai pada bulan Desember. Sedangkan di Sumatra dapat ditumpas selama tiga hari dan mendapat perlawanan yang relatif kuat. Pemberontakan ini pada akhirnya dihancurkan dengan brutal oleh pemerintah Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang

ditahan, 4.500 dipenjara, sejumlah 1.308 yang umumnya kader-kader partai diasingkan, dengan 823 dikirim ke Boven Digul. Hal ini menandai kehancuran PKI dan kemudian pelarangannya oleh pemerintah Belanda, yang kemudian memaksa PKI untuk bergerak secara rahasia.

2) Persatuan Pemuda Indonesia (PPI)

Pengaruh ibu kota besar pemerintahan Hindia Belanda pada tahun semakin berkembang pada masa pemerintahan Gubernur Fock pada tahun. Karena pemerintahan bersifat otokratis, Fock mengabaikan perkembangan kekuasaan rakyat. Pada saat itu, langkah-langkah penghematan diterapkan secara ketat, sehingga menciptakan pengangguran di semua tingkatan dan membuang banyak energi. Peraturan tersebut menimbulkan kekecewaan bahkan kebencian di kalangan kaum intelektual. Di bawah kepemimpinan pemimpin gerakan, orang melakukan pemogokan dan orang melakukan protes terhadap pemerintah, selalu berdasarkan prinsip-prinsip etika, namun dalam praktiknya terdapat 4,444 orang yang memiliki kecurigaan terhadap organisasi Indonesia, dan 4,444 orang yang menentang otoritas Indonesia. Kelompok asli Akibat langsung dari kebijakan Fock sejak tahun 1922 tidak lain adalah radikalisasi gerakan nasional. Konsentrasi radikal terjadi di Dewan Rakyat dan gerakan non-kooperatif melawan pemerintah kolonial mulai menyebar di kalangan orang terpelajar. Gerakan terbaru ini sangat condong ke arah gerakan sosialis, yang telah memberikan pengaruh besar terhadap gerakan nasional sejak awal masa remajanya.

Muncul citra pendirian PPPI berbunga mulai sejak teruna penuntut Sekolah Tinggi kedokteran dan Sekolah Tinggi Hukum karet teruna penuntut tersebut, sejak Tahun 1925 kancang bandar menakhlikkan diskusi-diskusi bagian politik. Mereka kisi-kisi lain adalah: Muksinun, Suwiryono, Usman Sastroamidjojo, Sigit, Gularso, Darwis, Surjono, Susalit dan Soegondo Djopoespito. Pokok bagian yang kancang dibicarakan adalah situasi kelakuan kewarganegaraanisme yang masih bersemangat kedaerahan masih berkekuatan di kisi-kisi teruna Indonesia, sehingga kancang terjadi permusuhan-permusuhan sempit yang menggantungkan sukunya. Untuk mengatasi situasi serupa itu, diperlukan adanya suatu perhimpunan teruna yang bersemangat netral dan tidak bersemangat kedaerahan. Tujuannya agar keinginan penuntut dan teruna yang memerlukan adanya rangkaian dan afiliasi di kisi-kisi karet teruna bisa tercapai. Selain memonitor tidak adanya afiliasi di kisi-kisi teruna daerah, mencari jalan juga memonitor situasi khalayak yang terpojok pahala mulai sejak praktik tata kolonial mulai sejak dominasi daerah koloni (45 Tahun Sumpah Pemuda; 1974; 211).

Terasa ada upaya yang mengarah kepada penyatuan organisasi pemuda tersebut. Inilah barang kali yang merupakan keinginan tokoh-tokoh pemuda pendiri PPPI. Ide pembentukan organisasi PPPI juga tidak terlepas dari pengaruh para pelajar Indonesia di Belanda. Para pelajar Indonesia yang sedang belajar di Belanda dan tergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI) memberikan dorongan semangat yang besar dalam pembentukan PPPI. Bahkan lahirnya kesadaran akan perlunya pembentukan organisasi pemuda yang bersifat nasional adalah buah pemikiran para tokoh PI melalui majalah yang diterbitkannya yaitu Indonesia Merdeka (Sudiyo; 1991; 112).

PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia beranggotakan para mahasiswa. Pada waktu itu perkataan mahasiswa belum begitu populer. Murid-murid perguruan tinggi juga masih disebut pelajar-pelajar. Jadi PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, jika sekarang dapat disebut Perhimpunan Mahasiswa-Mahasiswa Indonesia (Sagimun M.D; 1984; 141). Oleh karena kata mahasiswa belum tenar, maka organisasi itu atau perkumpulan mahasiswa tersebut dinamakan Pelajar-Pelajar Indonesia atau sering pula disingkat PPPI. Pelajar sendiri mengandung arti mereka yang kelak menjadi orang terpelajar.

Dalam pembentukan PPPI para pendirinya juga membentuk anggaran dasar organisasi yang berisi dasar-dasar organisasi (asas dan tujuan, kepengurusan, keanggotaan, dan lain-lain). PPPI berdiri berdasarkan atas kebangsaan Indonesia dan atas Kolonial Antithese, artinya berdiri atas perbedaan-perbedaan antara kaum yang menjajah (Belanda) dan kaum yang terjajah (bangsa Indonesia) (Pringgodigdo; 1993; 54). Sejak dari pangkalan, asas dan gerak usaha PPPI semua berdasarkan perbedaan kedudukan antara kaum yang menjajah dan kaum yang dijajah. PPPI memperhatikan dan merasakan penderitaan rakyat Indonesia sebagai akibat penjajahan Belanda. Tegasnya, PPPI lahir di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia yang menderita akibat penjajahan Belanda. PPPI bertujuan untuk menyatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda yang telah ada, yang umumnya memiliki latar belakang budaya, lokalitas, dan etnisitas yang berbeda (Sagimun M.D; 1984; 141). Sebagai organisasi yang lahir ditengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia yang menderita akibat penjajahan Belanda. PPPI bergerak dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Kegiatan politik merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan PPPI. Ini semua terlihat bahwa PPPI tidak hanya sepenuhnya bergerak di bidang politik, kenyataannya PPPI juga bergerak di bidang sosial-budaya dan bidang ekonomi.

Salah satu peristiwa bersejarah yang diakui banyak pihak atas kontribusi besar PPPI adalah diselenggarakannya Konferensi Pemuda Kedua di Jakarta. Konferensi yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 ini diakui sebagai konferensi oleh partai politik yang berbeda dan mempunyai arti penting dalam sejarah Indonesia, Indonesia sebagai bangsa dengan segala keberagamannya. Dalam rapat ini, Soegondo Djopoespit, Ketua PPPI ditunjuk memimpin rapat ini juga menunjukkan keberhasilan kegiatan politik PPPI.

Terselenggaranya Kongres Pemuda ke-2 tidak terlepas dari diselenggarakannya Kongres Pemuda ke-1 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei 1926. Pada Kongres, cita-cita persatuan belum diterima secara bulat oleh peserta. Keadaan ini terjadi karena generasi muda masih mempunyai keraguan dan kesalahpahaman (Ariwiadi; 1971; 158).

Kegiatan PPPI juga meliputi kegiatan di bidang sosial dan budaya. Salah satu kegiatan penting dalam bidang sosial adalah usaha meningkatkan pendidikan bagi masyarakat umum melalui Perguruan Rakyat. Pada bidang ekonomi kegiatan utama yang dilakukan adalah ingin menginfestasikan peranan petani dalam meningkatkan produksinya. Petani untuk mencapai produksi pertanian yang tinggi haruslah dilindungi dalam menggunakan haknya.

3) Tentara Pelajar

Tentara Mahasiswa adalah satuan militer yang terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan anggotanya sebagian besar adalah mahasiswa dan sejumlah kecil mahasiswa. [1] Pelajar di seluruh negeri adalah anggota Tentara Pelajar (TP), Tentara Pelajar Republik India (TRIP), Tentara Genie Pelajar (TGP), dll. Pelajar dan pelajar pejuang Jawa kemudian diintegrasikan ke dalam Brigade 17 TNI. Tentara Mahasiswa mempunyai beberapa nama, antara lain TRIP (Tentara Mahasiswa Republik Indonesia) di Jawa Timur dan TRIP (Tentara Mahasiswa Republik Indonesia) di Jogja dan Solo. Ada yang disebut tentara pelajar, TGP (Tentara Jin Mahasiswa) di Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagian Jogja, Kelompok Penyerang (SA) dan Kelompok Penyerang (CSA) di Boyorari, dan IMAM di Banyumas (Merdeka Ate Mati Indonesia) Ada unit mahasiswa Mastepe, mahasiswa Siliwangi di Jawa Barat, mahasiswa Sriwijaya di Sumsel, dan Pasukan T di wilayah Pati.

Saat Presiden Sukarno menghadapi invasi Belanda yang kedua, satuan tempur mahasiswa bersenjata dimasukkan ke dalam satuan otonom di jajaran TNI (Tentara Nasional Indonesia), yaitu Brigade TNI ke-17. Brigade TNI ke-17 kemudian diperluas menjadi lima divisi lagi, yaitu Detasemen I (TRIP) di Jawa Timur, Detasemen II (TP) di Solo, Detasemen III (TP) di Jogja, dan Detasemen IV di Jawa Barat, dan dipecah menjadi Densus V/Divisi Khusus (TGP).

Sementara satuan tempur pelajar lainnya tergabung dalam brigade TNI lainnya, seperti SA yang tergabung dalam Brigade 5 Panembahan Senopati. Pendorong terbentuknya tentara mahasiswa adalah para mahasiswa yang tergabung dalam satu-satunya organisasi mahasiswa pada masa kemerdekaan, yaitu Persatuan Pelajar Indonesia (IPI). Ketika pusat pemerintahan Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, maka pemerintahan IPI yang saat itu diketuai oleh Tatan Makmud juga ikut pindah ke Yogyakarta. Menanggapi tuntutan banyak anggota IPI yang menginginkan IPI mempunyai satuan tempur sendiri, maupun para mahasiswa yang tergabung dalam angkatan bersenjata lain yang bukan anggota mahasiswa, maka dibentuklah Divisi Pertahanan IPI yang kemudian dikenal dengan nama Divisi Pertahanan IPI.

Divisi, didirikan, dan namanya kemudian diubah. Nama diubah menjadi Markas Besar Pertahanan Mahasiswa (MPP). MPP ini terdiri dari tiga resimen. Yakni Resimen Adi Jawa Timur dipimpin Isman, Resimen B di Jawa Tengah dipimpin Soebroto, Resimen C di Jawa Barat dipimpin Mahatma, dan pada tanggal 17 Juli 1946 tiba di Lapangan Pingit Yogyakarta atas perintah. Oleh Mayor Jenderal dari Biro Keamanan Rakyat, Markas Besar Angkatan Darat. Moestopo, seorang pejabat senior MBTKR, diakui oleh Tentara Mahasiswa dan dilantik menjadi Tentara Mahasiswa.

Nama Tentara Pelajar berasal dari IPI Bela Negara setelah bergabung dengan Brigade TNI ke-17 pada tahun 1948 dan berada di bawah kendali Jawa Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi. Markas Besar (MBKD) berdiri di sana. Angkatan mahasiswa ini dibagi menjadi empat divisi I di Jawa Timur lebih dikenal dengan Tentara Republik Indonesia (TRIP) di bawah komando Isman, II Solo, Semarang dan sekitarnya berada di bawah komando Ahmadi.

Detasemen III di Yogyakarta, Kedu, Banyumas, Pekalongan dan sekitarnya di bawah Martono dan Detasemen IV di Cirebon dan Jawa Barat (biasa disebut Pasukan Mahasiswa (TPS) Siliwangi) di bawah Soritin dan divisi teknologi khusus (Divisi V) yang disebut Tentara Genie Mahasiswa (TGP) di bawah komando Hartawan. Secara resmi, wilayah komando terbagi, namun pergerakan unit mahasiswa ini unik di Indonesia dan sangat fleksibel. Komando regional dapat saling mendukung, bertukar wilayah, dan memindahkan unit hanya dengan memberi tahu pusat komando atau komandan unit lokal.

Kemampuan manuver unit ini sangat fleksibel tergantung pada faktor situasional. Status mereka sebenarnya adalah mahasiswa aktif, siap berperang kapan saja, sehingga peran mereka segera diubah menjadi militer. Tentara Pelajar secara resmi dibubarkan pada awal 1951 dalam sebuah upacara demobilisasi. Masing-masing anggota diberi penghargaan dari Pemerintah RI mewakili negara berupa "uang jasa", semacam beasiswa, yang disebut KUDP dan besarnya variatif. Juga diberikan pilihan untuk melanjutkan studi yang terbengkelai selama menjadi tentara pejuang. Atau melanjutkan karier militer di TNI maupun Polri bagi yang berminat. Untuk menghormati jasa para anggota Tentara Pelajar kini nama Tentara Pelajar diabadikan menjadi

nama-nama jalan di kota besar di Indonesia, dan di salah satu lokasi pertempuran Tentara Pelajar di daerah Sleman, Yogyakarta diberi nama Jalan Palagan Tentara Pelajar.

4) Gerakan 30 September (G30S)

Gerakan 30 September 1965 adalah sebuah gerakan yang sampai sekarang masih bersifat kontroversi. Ada berbagai pendapat dan kesaksian tentang G30S 1965, yang kemudian memunculkan berbagai versi G30S 1965. Setiap versi biasanya ada aktor utama yang memainkan peran sentral dalam gerakan 30 September 1965. Tiap-tiap versi memiliki aktor utama yang berbeda-beda. Seperti contoh, dalam versi Soeharto, yang menjabat sebagai presiden pada era Orde Baru, pemimpin utama G30S 1965 adalah Letkol Untung, yang juga adalah salah satu komandan Resimen Cakrabirawa, yang bertugas mengawal Presiden Soekarno. Sementara dalam versi TNI/ABRI, pemimpin utama G30S 1965 adalah ketua umum Partai Komunis Indonesia (PKI) yaitu D.N. Aidit. Ada beberapa versi dalam sejarah tentang G30S 1965. Pemaparan keseluruhan versi juga bermanfaat untuk memahami esensi dan filsafat tersembunyi dari gerakan 30 September 1965. Ada beragam sudut pandang dalam deskripsi sejarah tentang G30S 1965.

Catatan sejarah Orde Baru mengenai G30S 1965 didasarkan pada dua otoritas sejarah. Yang pertama adalah Soeharto sebagai pelaku sejarah yang bertanggung jawab atas pemberantasan G30S pada tahun 1965. Kedua adalah TNI/ABRI yang juga terlibat secara organisasi sebanyak orang Inilah pemberantasan G30S 1965. Sedangkan untuk G30S 1965, terdapat beberapa perbedaan antara versi Soeharto dan TNI/ABRI, namun keduanya sama. Ada pandangan bahwa PKI secara organisasi paling bertanggung jawab atas peristiwa 30 September. Oleh karena itu Orde Baru menamakan Gerakan 30 September 1965 dengan singkatan G30S/PKI 1965. Demikian pernyataan Soeharto terkait G30S tahun 1965.

Sukarno memperkenalkan kebijakan penyeimbangan untuk mempertahankan kekuasaan. Sukarno membutuhkan PKI dan kekuatan besarnya untuk memperkuat posisi perundingannya dengan militer. Sesaat sebelum G30S, mulai tidak seimbang karena Sukarno mulai beralih ke PKI seiring dengan meningkatnya kekuatan massanya (Roosa, 2008: 297). PKI, salah satu kekuatan politik dominan pada masa rezim Sukarno, menjadi tidak puas dengan situasi politik di bawah rezim Sukarno. Ketidakpuasan ini terutama disebabkan oleh kurangnya komposisi menteri di kabinet Sukarno. Keberpihakan Sukarno terlihat saat ia menghukum para perwira Angkatan Darat yang membekukan 4.444 cabang PKI di berbagai daerah pada tahun 1960an.

B. Aliran Moderat masa Pergerakan Nasional

Moderat merupakan perjuangan yang dilakukan menghindari tindakan kekerasan atau perilaku yang keras atau ekstrem. Adapun beberapa contoh Aliran Moderat pada masa Pergerakan Nasional adalah:

1) Sarekat Islam (SI)

Sarekat Islam adalah satu di antara organisasi politik Indonesia abad ke 20 yang paling menonjol Ia sejak semula adalah gerakan politik. SI adalah transformasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan di Solo pada 11 Nopember 1911 oleh H. Samanhudi, seorang pedagang muslim kaya di Surakarta, Jawa Tengah. SDI mula- mula diarahkan melawan kegiatan Cina yang menguasai dunia perdagangan dengan mengorbankan pribumi; Di sisi lain adalah perlawanan tidak langsung ditujukan kepada Belanda yang memberikan prioritas dan perlindungan kepada usahawan Cina yang agresif dalam perdagangan dan industri. Pada 1912 SDI menjadi SI dan mendapatkan pemimpin organisator baru yang kompeten, H O S Tjokroaminoto (1883-1934).

Perubahan SDI menjadi SI punya tujuan politis dan strategis, betapa tidak karena diharapkan organisasi ini bukan saja berkiprah dalam bidang ekonomi, akan tetapi diperluas wawasannya dalam bidang politik Hal ini penting karena kondisi pada waktu itu menuntut berdirinya partai Islam sebagai wadah aspirasi umat Islam yang dapat disalurkan kepada Pemerintah Hindia Belanda Sebagai konsekwensi logis tentunya diperlukan seorang figur pemimpin yang memiliki mental berani untuk dapat menjembatani aspirasi tersebut. Pilihan figur leadership kepada H.O.S Tjokroaminoto adalah sangat tepat, karena beliau dikenal sebagai tokoh radikal. SI lahir sebagai sikap perlawanan dari unsur non pribumi Cina yang seringkali mengorbankan pribumi dalam dunia bisnis. Jadi dikotomi antara pribumi dan non pribumi pada dasarnya sudah muncul sejak dulu dan ini ditunjukkan oleh ambisi kuat pihak non pribumi untuk menguasai lapangan usaha dengan mendiskreditkan pihak pribumi. Oleh karena itu minimal ada dua faktor penyebab berdirinya organisasi Sarekat islam ini, pertama, kompetisi yang meningkat dalam bidang perdagangan batik terutama dengan Cina, dan sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada tahun 1911. Kedua, karena mendapat tekanan dari kalangan bangsawan terhadap masyarakat Indonesia di Solo. Sarekat Dagang Islam dimaksudkan menjadi benteng bagi orang-orang Indonesia yang umumnya terdiri dari pedagang- pedagang batik di Solo terhadap orang-orang Cina dan para bangsawan.

2) Partai Indonesia Raya (PIR)

Parindra didirikan oleh dr. Sutomo dan kawan-kawan pada tahun 1935 di Surabaya dan merupakan fusi dari partaipartai politik, antara lain: Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Serikat Betawi, Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), dan Sumateraen Bond. Di dalam Parindra-lah golongan cerdas-cendekiawan priyayi Jawa yang diwakili PBI dan golongan birokratis konservatif priyayi Jawa yang diwakili feodal Budi Utomo dapat digabungkan dengan serasi ke dalam satu barisan dan mampu bekerja

bersama secara politik. Parindra merupakan partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia Rayadan bertujuan Indonesia Mulya dan Sempurna.

Perjuangan Parindra dalam menghadapi politik Pemerintah HindiaBelanda meliputi berbagai bidang dankesempatan. Di bidang politik, Parindra berusaha duduk dalam keanggotaan RaadRaad (Dewan), seperti Volksraad (Dewan Rakyat) di pusat, Provinciale Raad (Dewan Provinsi) di daerah (Kalimantan Selatan), Banjar Raad, Gemeenteraad(Dewan Gemeente), dan Raad-Raad lokal lainnya. Menurut L.M. Sitorus (1951:52), organisasi Parindra tidak secara prinsipil menganut asas politik non co atau co, sehingga sepak terjangnya keluar tampak seperti cooperator dan kadang-kadang seperti non-cooperator. Parindra tidak menolak duduk dalam dewan-dewan bentukan pemerintah kolonial, tetapi bila perlu atau jika usulnya tidak diterima oleh pemerintah kolonial, mereka meninggalkan dewan-dewan tersebut dan menjalankan apa yang disebut dengan *incidentele* atau *utilistische non-cooperatie* (memanfaatkan sikap non-kooperatif) selama waktu yang ditentukan oleh partai.

Meskipun Parinda menganut asas politik kooperatif, organisasi ini tetap bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Sebagaimana dikatakan oleh Mohammad Husni Thamrin dalam pidatonya, bahwa nasionalis kooperatif dan nonkooperatif memiliki satu tujuan bersama yang sama-sama yakin pada Indonesia Merdeka. Duduknya anggota Parindra dalam Banjar Raad, mempunyai tujuan tertentu, yaitu: (1) Untuk menyampaikan suara rakyat secara legal; (2) Memberikan saran agar dalam mengatur pemerintahan, banyak memberikan keuntungan kepada rakyat; (3) Mencoba melakukan oposisi secara sehat; (4) Memperlihatkan kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa bangsa Indonesia sanggup memerintah.

3) Partai Nasional Indonesia (PNI)

Pada hari Senin tanggal 4 Juli 1927, berdirilah Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung, yang kemudian dalam Kongresnya yang pertama di Surabaya pada tanggal 27-30 Mei 1928 diganti namanya menjadi Partai Nasional Indonesia. Para pendiri partai tersebut terdiri dari 8 orang yaitu Ir. Soekarno, dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Mr. Sartono, Mr. Ishak, Mr. Sunario, Mr. Budiarto, dan dr. Samsi. Oleh karena PNI dianggap sebagai organisasi yang dapat mengganggu stabilitas negara, maka pemerintah kolonial Belanda melarangnya. Pada tanggal 25 April 1931 kemudian partai ini dibubarkan dengan persetujuan Pengurus Pusat dan Daerah. Perkembangan PNI ini dapat dilihat kembali pasca kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat itu Presiden Soekarno memberikan pidato yang berisi anjuran untuk pembentukan Partai Nasional Indonesia.

Prakarsa Presiden Soekarno untuk mendirikan PNI sebagai satu-satunya partai yang anggotanya mencakup semua aliran politik di dalam masyarakat yang baru merdeka tersebut hanya sebuah propaganda saja. Babak selanjutnya, nasib PNI sebagai partai tunggal menjadi berantakan ketika pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkan sebuah Maklumat, hasil desakan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) untuk mendirikan sebanyakbanyaknya partai politik demi terselenggaranya iklim negara yang demokratis. Maka, sejak tanggal 3 November 1945 berdirilah partai-partai politik, seperti Partai Sosialis sebagai peburan golongan Sosialis Syahrir dan golongan Sosialis Amir Syarifuddin, yakni Partai Rakyat Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia, serta partai dari kaum nasionalis yaitu Serikat Rakyat Indonesia atau Serindo.

Serindo merupakan partai yang menjalin hubungan dengan pimpinan-pimpinan organisasi golongan nasionalis diberbagai daerah di tanah air. Pada perkembangan disetujui untuk mengadakan fusi antara Serindo dengan seluruh organisasi yang berfaham nasionalis lainnya, yang akhirnya dibentuk organisasi baru dengan nama Partai Nasional Indonesia dengan Sarmidi Mangunsarkoro sebagai ketuanya. Melihat sejarah singkat PNI di atas, menjelaskan dinamika perkembangan PNI dalam setiap periode mengalami perbedaan serta pasang surut.

Perbedaan pada tahap pembentukan PNI tahun 1927 antara lain oleh Soekarno, bahwa PNI merupakan salah satu partai yang pada masa tersebut dibentuk dalam situasi penjajahan pemerintah kolonialisme Belanda. Hal tersebut mempengaruhi ideologi pendiri yang bertujuan partai untuk mencapai kemerdekaan. Azas yang dipakai adalah nasionalisme dan demokrasi, dari azas ini PNI mengharapkan agar masyarakat Indonesia yang dijajah oleh Belanda menjadi satu bangsa yakni Indonesia. Sedangkan azas demokrasi PNI mengharapkan terwujudnya persamaan bagi semua orang di dalam masyarakat dan adanya kekuasaan rakyat di dalam negara. Sementara PNI yang didirikan pasca kemerdekaan Indonesia menginginkan suatu bentuk partai yang dapat mengisi kemerdekaan, dengan pembangunan di segala sektor seperti pertahanan, perekonomian, sosial, dan politik yang tercantum sesuai UUD 1945.

Untuk mencapai tujuannya tersebut, Soekarno ingin merangkul seluruh elemen masyarakat serta tentunya seluruh elemen golongan aliran politik yang ada bergabung ke dalam satu wadah, yakni partai tunggal PNI (Cahyo Budi Utomo). Di sisi lain, PNI yang dibentuk pasca dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945, yang pada mulanya bernama Serindo merupakan suatu partai kelanjutan yang masih memegang teguh nilai dasar perjuangan PNI tahun 1927. Namun babak baru bagi perkembangan PNI untuk memantapkan posisinya dalam pemerintahan serta mempersiapkan seluruh kadernya dalam menduduki parlemen atau kabinet di mulai dari tahun 1950-1955. Dapat dikatakan demikian, karena sebagai salah satu

partai yang kuat serta kader-kadernya berpengalaman dalam pemerintahan PNI juga harus mengamankan posisi Soekarno untuk tetap menjadi Presiden di Indonesia. Sehingga jelas gambaran yang harus dilakukan PNI dalam mempersiapkan mesin partai nya dalam menghadapi Pemilu 1955, dimana terdapat 3 kekuatan partai yang juga kuat yakni Masyumi, PKI, dan Nahdlatul Ulama.

4) Partai Indonesia (PI)

Generasi tahun 1920 yang bergabung dalam Persatuan Indonesia mendorong terjadinya perubahan organisasi. Gagasan tentang tujuan, simbol dan anggaran dasar organisasi mulai dirumuskan. Di bawah kepemimpinan Herman Kartowisastro, nama *Indische Vereeniging* diubah menjadi *Indonesische Vereeniging*. Disepakati pula bahwa lambang organisasi akan berwarna merah putih dengan tambahan gambar seekor kerbau.

Lambang organisasi *Indonesische Vereeniging* mempunyai makna dan filosofi yang sangat mendalam serta sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. . Warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Selain itu kepala kerbau juga merupakan lambang kesabaran, ketangguhan, dan keberanian bangsa Indonesia, penggunaan nama *Indonesische Vereeniging* membuat para pelajar Hindia Timur Belanda di Belanda setara dengan warga negara lainnya. Permasalahan muncul dalam menentukan nama-nama penduduk Hindia Belanda. Istilah *Nederlandsch-Indie* dan *Insulinde* dianggap tidak tepat dan menghina. Darmawan Mangunkuono kemudian mengusulkan nama "Indonesia" untuk menggantikan istilah *Nederlandsch-Indie*. Nama tersebut tentu menarik perhatian banyak orang hingga Majelis Umum pada tanggal 19 Februari 1922 memutuskan untuk menggunakan nama "Indonesia" untuk menyebut seluruh wilayah Hindia Belanda. Sekaligus rakyatnya disebut Rakyat Indonesia. Sejak tahun 1923, di bawah pimpinan Iwa Kusumasumantri, anggaran dasar organisasi mulai diformalkan.

Terbitnya konstitusi menunjukkan bahwa *Indonesische Vereeniging* yang kemudian resmi berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1925 memiliki arah dan tujuan yang jelas. Konstitusi Pi kemudian menjadi landasan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Perkumpulan Indonesia tumbuh menjadi organisasi yang radikal karena didukung oleh para intelektual muda.

Pengaruh Pi dapat dilihat di banyak partai politik yang didirikan sekitar tahun 1920-an. Munculnya banyak partai politik dinilai hanya akan melemahkan pergerakan nasional. Banyaknya partai politik yang mengejar kepentingannya sendiri menyebabkan gerakan sebagai satu kesatuan terabaikan. Berkat kerja sama antara Soekarno dan PSI Sukiman, 17.-18. diadakan kongres di Bandung pada bulan Desember 1927. Kongres tersebut dihadiri oleh PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatranenbond, Orang Betawi dan Kelompok Kajian Indonesia. Dalam kongres tersebut diputuskan untuk mendirikan perkumpulan yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan-Perkumpulan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Dalam anggaran dasar organisasi dinyatakan bahwa federasi tersebut merupakan suatu badan federasi yang tidak membawahi partai- partai politik yang ada, tetapi mereka melanjutkan pergerakan bebas, dan serikat pekerja hanya melakukan kegiatan yang telah disepakati sebelumnya. Bersamaan dengan upaya pembentukan PNI dan PPPKI, generasi muda mulai bergabung dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1926. PPPI mencita-citakan persatuan pemuda Indonesia, dengan mengesampingkan perbedaan daerah. Puncak pergerakan pemuda nasional terjadi pada kongres pemuda yang kedua pada tanggal 26-28 Oktober 1928. Kongres tersebut dihadiri oleh 9 organisasi pemuda terkemuka dan melibatkan tokoh politik berpengaruh seperti Sukarni, Sartono dan Sunarjo, sumpah setia kepada para duta besar yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.

4. CONCLUSION

Aliran radikal pada masa pergerakan nasional di Indonesia menunjukkan semangat perlawanan yang kuat terhadap penjajahan. Aliran ini cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih keras dan revolusioner dalam upaya mencapai kemerdekaan. Mereka berani mengambil risiko dan menggunakan taktik-taktik yang lebih ekstrem untuk melawan penjajah. Namun, aliran radikal juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya dukungan dari sebagian besar masyarakat yang lebih memilih pendekatan yang lebih moderat.

Di sisi lain, aliran moderat dalam pergerakan nasional menekankan pentingnya diplomasi dan negosiasi untuk mencapai kemerdekaan. Mereka berusaha menjalin hubungan dengan pihak penjajah dan mengedepankan dialog sebagai cara untuk memperoleh hak-hak yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Pendekatan moderat ini lebih mengutamakan stabilitas dan keberlanjutan perjuangan dalam jangka panjang. Meskipun aliran moderat sering kali dianggap sebagai pendekatan yang lebih lambat dalam mencapai kemerdekaan, strategi ini membuktikan keberhasilannya dalam mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan komunitas internasional.

Kesimpulannya, aliran radikal dan moderat pada masa pergerakan nasional memiliki peran penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Kedua aliran ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun keduanya berkontribusi dalam memperjuangkan hak-hak dan kebebasan rakyat Indonesia. Dalam perjalanan

sejarah pergerakan nasional, terlihat bahwa kombinasi dari kedua aliran ini membawa perubahan yang signifikan dan mengarah pada kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati saat ini.

REFERENCES

- Kartodirjo, S. (1985). Ratu Adil. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mulyadi. (2017). Peran Pemuda Dalam Mencegah Paham Radikalisme. Universitas PGRI Palembang.
- Mursal, B. W. (2022). Analisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942. *Jurnal Sejarah*, 54-66.
- Muryadi, A. K. (2017). PNI Dalam Pemilu 1955 di Jakarta. *Jurnal Kesenjarahan*, 53-62.
- Nuh, M. M. (2009). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 36.
- Rinaldo, Y. d. (2022). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Penerbit lakeisha.
- Rusdiana, Y. T. (2017). Peranan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Dalam Upaya Mencapai Kemerdekaan Republik Indonesia. *Jurnal Sriwijaya Historia*, 42-55.
- Sardiman, A. d. (n.d.). Perhimpunan Indonesia Sebagai Organisasi Pergerakan Indonesia Yang Revolusioner (1922-1930).
- Usman, I. (2017). Sarekat Islam (SI) Gerakan Pembaruan Politik Islam. *JURNAL POTRET*, 46-54.
- Wajidi. (2015). Eksistensi Partai Indonesia Raya (PARINDRA) Di Kalimantan Selatan, 1935-1942. *Jurnal Patanjala*, 17-32.
- Zuhroh Lathifah, S. A. (2020). Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Adab Pres.